

Efektivitas Dan Efisiensi Belanja Daerah Untuk Pembangunan Manusia Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Papua

Tutun Arjuna Kende
arjuna.kende@gmail.com
Yundy Hafizrianda
Risky Novan Ngutra

Abstract

This study aims to analyse the effectiveness and efficiency of regional spending on human development and poverty alleviation in Papua Province. We conducted this research in the context of districts and cities across Papua Province. The study utilized secondary data sourced from the Central Statistics Agency of Papua Province and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, covering the period from 2010 to 2022. The data analysis method employs data envelope analysis (DEA) to measure the efficiency level of regional spending, as well as panel data regression analysis to analyse the effectiveness and influence of regional spending on human development and poverty alleviation. The study's findings show that, in general, regional spending in districts and cities throughout Papua Province is inefficient. Only a few districts and cities efficiently allocate regional spending for human development and poverty alleviation. Furthermore, the average regional expenditure is effective and has a positive effect on the human development index in districts and cities throughout Papua province; only Jayapura city has a significant effect on the human development index. While the average regional expenditure is effective and has a negative effect on the percentage of poor people in districts and cities throughout Papua province, only Intanjaya, Jayawijaya, and Nduga districts have no significant effect on the percentage of poor people.

Keywords: effectiveness, efficiency, regional expenditure, human development, poverty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi belanja daerah dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua. Penelitian ini dilakukan pada lingkup kabupaten/kota se Provinsi Papua. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode 2010-2022. Metode analisis data menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengukur tingkat efisiensi belanja daerah, dan analisis regresi data panel untuk menganalisis efektivitas dan pengaruh belanja daerah terhadap pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum belanja daerah di kabupaten/kota se Provinsi Papua belum efisien. Hanya beberapa kabupaten/kota yang efisien dalam mengalokasikan belanja daerah untuk pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, rata-rata belanja daerah efektif dan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota se provinsi Papua, hanya kota Jayapura yang belanja daerahnya tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan rata-rata belanja daerah efektif dan berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin di kabupaten/kota se provinsi Papua, hanya kabupaten Intanjaya, Jayawijaya dan Nduga yang belanja daerahnya tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin.

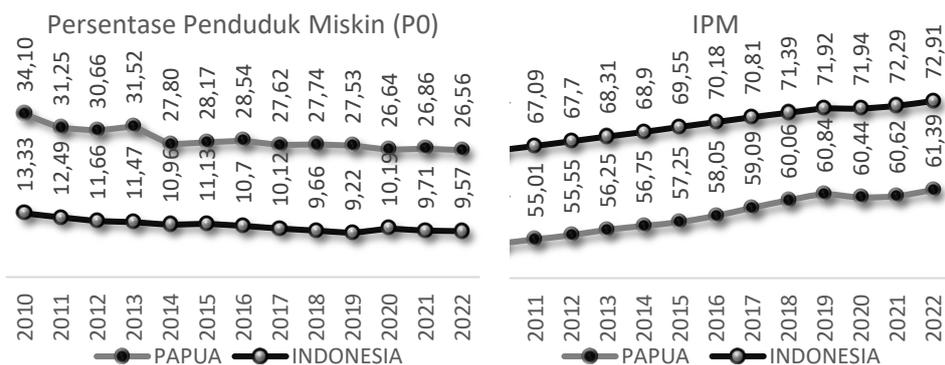
Kata kunci: efektivitas, efisiensi, belanja daerah, pembangunan manusia, kemiskinan

PENDAHULUAN

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dalam pandangan ekonomi makro,

kemiskinan menggambarkan kegagalan suatu negara atau daerah untuk bisa mencapai kinerja perekonomian yang optimal karena masih adanya faktor-faktor produksi yang tidak digunakan sesuai dengan kapasitasnya (Kristiyanto & Widodo, 2017). Selain kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Sistem perhitungan ini diperkenalkan oleh seorang ekonom bernama Amartya Sen dan dibantu oleh Mahbub Ul Haq, sehingga sering indeks ini disebut Indeks Sen. IPM mencakup 3 (tiga) komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*decent living*) (BPS, 2024)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Papua mencapai lebih dari 20%, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di sekitar 10%. Fenomena yang sama juga tampak jelas pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua baru mencapai 61 poin, angka ini masih dibawah rata-rata nasional dan menjadi yang terendah bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan selama ini belum memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat yang ada di Papua.



Gambar 1. Persentase penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010-2022 (dalam persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang tinggi dan IPM yang rendah di Papua, dibutuhkan kebijakan dan strategi yang tepat dalam pelaksanaan berbagai program yang digunakan melalui belanja daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah ditujukan tidak hanya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah, tetapi juga untuk mengatasi berbagai masalah utama seperti penanganan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama layanan dasar, peningkatan produktivitas sektor-sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan peningkatan daya saing investasi.

Anggaran pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi di wilayah provinsi Papua masih mengandalkan dana transfer pusat atau dana perimbangan. Total pendapatan daerah untuk kabupaten/kota dan provinsi di wilayah provinsi Papua sepanjang tahun 2010-2022 telah mencapai 549,85 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, TKDD dan Pendapatan Lainnya. Sementara total alokasi belanja daerah untuk kabupaten/kota dan provinsi di wilayah provinsi Papua sepanjang tahun 2010-2022 telah mencapai 540,13 triliun yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya (belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga). Alokasi belanja daerah di wilayah provinsi Papua ditujukan untuk pelaksanaan berbagai program yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi Papua sesuai yang diamanatkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 maupun undang-undang nomor 33 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2022.

Tabel 1. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010-2022 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Pendapatan Provinsi Papua	Total Pendapatan Kab/Kota	Total Pendapatan Kab/Kota & Provinsi Papua	Belanja Provinsi Papua	Total Belanja Kab/Kota	Total Belanja Kab/Kota & Provinsi Papua
2010	5.662	16.568	22.230	5.650	15.764	21.414
2011	6.228	19.543	25.770	6.290	18.429	24.719
2012	7.462	20.212	27.674	7.240	20.012	27.252

Tahun	Pendapatan Provinsi Papua	Total Pendapatan Kab/Kota	Total Pendapatan Kab/Kota & Provinsi Papua	Belanja Provinsi Papua	Total Belanja Kab/Kota	Total Belanja Kab/Kota & Provinsi Papua
2013	8.397	24.349	32.746	8.171	23.223	31.394
2014	10.710	28.824	39.533	10.304	27.642	37.946
2015	11.806	33.488	45.294	12.396	33.339	45.735
2016	12.568	37.608	50.176	11.968	37.381	49.350
2017	13.007	36.256	49.263	13.303	35.873	49.176
2018	13.490	38.705	52.195	13.187	37.900	51.087
2019	15.240	38.016	53.256	13.422	38.572	51.993
2020	13.031	34.574	47.605	12.607	34.957	47.564
2021	13.886	36.611	50.497	14.860	35.474	50.333
2022	11.040	42.577	53.617	11.455	40.713	52.168
Total	142.526	407.330	549.856	140.854	399.279	540.133

Sumber: DJPK (data diolah), 2024

Pengelolaan belanja daerah yang efisien dan efektif akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan realitas di Papua yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang besar belum sepenuhnya berdampak positif pada penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM. Sehingga kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan efektivitas belanja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tetapi secara teori, belanja daerah yang efisien dan efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (Prakasa & Suparyati, 2022).

Penelitian Hafizrianda (2017) menemukan bahwa dari 29 kabupaten/kota di Papua yang teridentifikasi sepanjang tahun 2012-2014, tidak ada satupun yang mencapai efisiensi dalam membelanjakan belanjanya secara bersamaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada kabupaten dan kota yang ideal dalam mencapai sinergi dan integrasi pengelolaan keuangan daerah di bidang Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian

besar kabupaten dan kota di Provinsi Papua menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang pendidikan seperti perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Selain itu, keterbatasan akses dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya dapat menyebabkan risiko pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Sehingga, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan hasil pembangunan dan juga mengalokasikan sumber daya dengan tepat guna (Putri & Prasetyia, 2023).

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji pentingnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah, akan tetapi studi yang spesifik mengkaji dampak langsung dari belanja daerah terhadap pembangunan manusia dan kemiskinan di Provinsi Papua masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dan memberikan kontribusi yang berarti bagi semua *stakeholders*. Penelitian ini akan mengukur Pembangunan Manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengukur tingkat kemiskinan melalui indikator persentase penduduk miskin. Diharapkan dengan adanya analisis ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana belanja daerah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara tepat. Penelitian ini dilakukan pada 29 Kabupaten/Kota Se Provinsi di wilayah Provinsi Papua sepanjang tahun 2010-2022 sebelum adanya pemekaran daerah otonomi baru (DOB).

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Konsep Negara Kesejahteraan (*welvaartsstaat, Welfare State*) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe

negara liberal, di mana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga “negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu :

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial”

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa

Indonesia, khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.

Kerangka Pemikiran

Gambar 2. Kerangka Berpikir



Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Sumber : Peneliti, 2024

Pengembangan Hipotesis

H₁: Tercapainya Efisiensi belanja daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua

H₂: Tercapainya Efisiensi belanja daerah untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua

H₃: di duga belanja daerah efektif dan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua

H₄: di duga belanja daerah efektif dan berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua yang berjumlah 28 kabupaten dan 1 kota. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Seluruh data berjenis data time series yang dikumpulkan berdasarkan tahun 2010-2022 sebagai tahun penelitian. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Tahun 2010-2022, Papua Dalam Angka Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2022, data yang diperoleh merupakan data belanja daerah, persentase penduduk miskin, dan IPM 29 kab/kota se Provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelusuran pada website DJPK <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> dan BPS <https://papua.bps.go.id/>.

Definisi Operasional Variabel

Efektivitas Belanja Daerah adalah tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan dari anggaran belanja daerah untuk mendukung pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua. Sedangkan Efisiensi Belanja Daerah adalah kemampuan anggaran belanja daerah untuk menghasilkan *output* atau capaian yang optimal dengan *input* sumber daya yang terbatas dalam mendukung pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua.

Belanja daerah adalah suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan merinci pengeluaran atau alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan serta pembangunan daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah dalam satu tahun

anggaran. Belanja daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja daerah 29 kabupaten/kota se Provinsi Papua periode 2010-2022 diukur dalam satuan rupiah.

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator persentase penduduk miskin tahun 2010-2022 dalam satuan persen, dimana semakin rendah persentase penduduk miskin, maka akan semakin baik.

Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai. Ini mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Data Envelopment Analysis (DEA)

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif maka metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode statistic. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), merupakan metode yang telah distandarisasi sebagai alat untuk mengukur kinerja suatu aktivitas unit. Proses pengolahannya menggunakan perangkat lunak DEAP version 2.1. DEA bekerja dengan langkah mengidentifikasi unit-unit yang akan dievaluasi, input serta output unit tersebut. Selanjutnya, dihitung nilai produktivitas dan mengidentifikasi unit mana yang tidak menggunakan input secara efisien atau tidak menghasilkan output secara efektif. Produktivitas yang diukur bersifat komparatif atau relatif, karena hanya membandingkan antar unit pengukuran dari 1 set data yang sama. DEA adalah model analisis faktor produksi untuk mengukur tingkat efisiensi relatif dari set unit kegiatan ekonomi (UKE). Skor efisiensi dari banyak faktor input dan output dirumuskan sebagai berikut Talluri, 2000;

$$Efisiensi = \frac{Jumlah\ output\ tertimbang}{Jumlah\ input\ tertimbang}$$

Dalam DEA, efisiensi relatif UKE didefinisikan sebagai rasio dari *total output* tertimbang dibagi *total input* tertimbangnya (*total weighted output/total weighted input*). Inti dari DEA adalah menentukan bobot (*weights*) atau timbangan untuk setiap *input* dan *output* UKE. Bobot tersebut memiliki sifat: (1) tidak bernilai negatif, dan (2) bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (*total weighted output/total weighted input*) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (*total weighted output/total weighted input < 1*)

$$\text{Maksimumkan } Z_k = \frac{\sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rk}}{\sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ik}}$$

Asumsi DEA, tidak ada yang memiliki efisiensi lebih dari 100% atau 1, maka formulasinya:

$$\frac{\sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rk}}{\sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ik}} \leq 1, k = 1, 2, 3 \dots n$$

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif :

$$U_{rk} \geq 0 ; r = 1, \dots, s$$

$$V_{ik} \geq 0 , i = 1, \dots, m$$

Salah satu kendala dari pemecahan persamaan tersebut adalah persamaan berbentuk fraksional sehingga sulit dipecahkan dengan pemrograman linear. Namun demikian dengan melakukan linearisasi persamaan dapat diubah menjadi persamaan linear sehingga pemecahan melalui pemrograman linear dapat dilakukan. Dasar pengukuran efisiensi dengan DEA adalah program linear, transformasi program linier yang kita sebut dengan DEA adalah sebagai berikut:

Memaksimumkan.

$$Z_k = \sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rk}$$

Dengan batasan atau kendala:

$$\sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rk} - \sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ik} \leq 0 ; j = 1, 2, 3, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ik} = 1, 2, 3, \dots n$$

$U_{rk} \geq 0$; $r = 1, 2, 3, \dots s$

$V_{ik} \geq 0$, $i = 1, 2, 3, \dots m$

Dimana:

Z_k : nilai optimal sebagai indikator efisiensi relatif dari UKE k

Y_{rk} : jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE k

X_{ik} : jumlah input i yang digunakan UKE k

s : jumlah output yang dihasilkan

m : jumlah input yang digunakan

U_{rk} : bobot tertimbang dari output r yang dihasilkan tiap UKE k

V_{ik} : bobot tertimbang dari input i yang dihasilkan tiap UKE k

Analisis Regresi Data Panel

Untuk Penelitian ini juga menggunakan Alat analisis *statistic deskriptif*. Data-data yang telah dikumpulkan dihitung menggunakan model elastisitas dalam bentuk panel data dengan menggunakan program *eviews*. Analisis dilakukan dengan mengelola data menggunakan *software Econometric Views (EViews)* versi 7.2. Dalam penelitian ini akan dilakukan pemodelan regresi data panel untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persentase Penduduk Miskin tahun 2010-2022. Persamaan regresi yang digunakan untuk mengukur efektifitas belanja daerah terhadap IPM dan Tingkat Kemiskinan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur efektifitas belanja daerah terhadap IPM, digunakan persamaan regresi *double log*:

$$\ln IPM = \ln a_{0it} + a_1 \ln BJDH_{it} + e_{it}$$

dimana :

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

- BJDH : Belanja Daerah
 α_1 : Koefisien Elastisitas
 i : Kabupaten/kota
 t : Waktu/periode
 e : *Disturbance error* (gangguan acak)

Untuk mengukur efektifitas belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan, digunakan persamaan regresi *double log*:

$$\ln KMS = \ln \beta_{0it} + \beta_1 \ln BJDH_{it} + e_{it}$$

dimana :

- KMS : Tingkat Kemiskinan
BJDH : Belanja Daerah
 β_1 : Koefisien Elastisitas
 i : Kabupaten/kota
 t : Waktu/periode
 e : *Disturbance error* (gangguan acak)

Dikatakan efektif jika koefisien elastisitas α_1 atau β_1 , signifikan secara statistic dan lebih besar dari 1 ($E > 1$).

Model Regresi Data panel

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi parameter model regresi data panel, bertujuan untuk memilih model terbaik yang tepat dan sesuai dari ketiga model regresi antara lain *Common effect Model*, *Fixed Effect Model*, *Random effect Model*.

Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F)

Uji t digunakan untuk menguji salah satu hipotesis di dalam penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dengan kriteria :

- a. Jika *probabilitas* $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.
- b. Jika *probabilitas* $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

Uji F digunakan untuk menguji salah satu hipotesis di dalam penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Hasil uji F dilihat dengan kriteria :

- a. Jika nilai *probabilitas* $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai *probabilitas* $> 0,05$, maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data belanja daerah kabupaten/kota se provinsi Papua, terjadi peningkatan realisasi belanja daerah di hampir semua kabupaten/kota dari tahun 2010 hingga 2022. Ini menunjukkan adanya peningkatan anggaran dan kebutuhan pembangunan di daerah-daerah tersebut. Kabupaten dengan realisasi belanja daerah terbesar pada tahun 2022 adalah Kabupaten Mimika, yaitu sebesar 4.425.056 juta. Hal ini dapat dikaitkan dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan yang tinggi di wilayah tersebut, terutama terkait dengan industri pertambangan, namun ini memberikan peluang bagi Kabupaten Mimika untuk mempercepat dan meningkatkan pembangunan diwilayahnya. Beberapa kabupaten lain yang memiliki belanja daerah relatif besar dan terus meningkat antara lain Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini mengindikasikan adanya pembangunan yang sedang berlangsung di wilayah-wilayah tersebut.

Sementara itu terdapat beberapa kabupaten yang mengalami fluktuasi cukup signifikan dalam realisasi belanja daerahnya, seperti Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Supiori. Ini mungkin disebabkan oleh perubahan kebijakan anggaran atau prioritas pembangunan di daerah tersebut dari tahun ke tahun. Namun secara umum, pola peningkatan belanja daerah terlihat konsisten di sebagian besar kabupaten/kota, meskipun terdapat beberapa fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

Pembahasan Hasil Penelitian

Efisiensi Belanja Daerah Untuk Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua

Dari hasil di atas menunjukkan secara rata-rata hanya sebanyak 1 atau sebesar 3,45% Kabupaten/Kota se Provinsi Papua yang sepanjang tahun 2010-2022 secara konstan telah mencapai efisiensi teknis $TE=1$ atau 100% (*perfectly efficiently/best practice*) yaitu Kota Jayapura, ini menunjukkan bahwa kota Jayapura telah mencapai praktik terbaik (*best practice*) dalam produksi. Sementara itu sebanyak 11 DMU/Kabupaten di Provinsi Papua atau sebesar 37,93% yang dapat di kategorikan efisiensi baik atau tinggi dengan interval $0,800 \leq TE < 1,00$. Selanjutnya, terdapat sebanyak 4 atau sebesar 13,79% Kabupaten yang dapat di kategorikan cukup baik dengan interval $0,714 \leq Te < 0,800$ dan sebanyak 13 atau sebesar 44,83% Kabupaten yang masuk dalam kategori rendah dengan interval $TE < 0,714$.

Tabel 2. Persentase Pringkat DMU (Kabupaten/Kota) se Provinsi Papua berdasarkan Nilai TE DEA VRS Output Oriented IPM Tahun 2010-2022

Tahun	Kriteria Interval			
	Efisien (<i>perfectly efficiently/best practice</i>) ($TE=1,00$)	Baik/Tinggi ($0,800 \leq TE < 1,00$)	Cukup Baik ($0,714 \leq Te < 0,800$)	Rendah ($TE < 0,714$)
2010	10,34	31,03	13,79	44,83
2011	10,34	27,59	17,24	44,83
2012	17,24	27,59	17,24	37,93

Tahun	Kriteria Interval			
	Efisien (perfectly efficiently/best practice) (TE=1,00)	Baik/Tinggi ($0,800 \leq TE < 1,00$)	Cukup Baik ($0,714 \leq Te < 0,800$)	Rendah (TE < 0,714)
2013	13,79	27,59	10,34	48,28
2014	17,24	24,14	10,34	48,28
2015	6,90	34,48	13,79	44,83
2016	6,90	34,48	13,79	44,83
2017	10,34	31,03	10,34	48,28
2018	6,90	34,48	17,24	41,38
2019	6,90	34,48	17,24	41,38
2020	6,90	31,03	13,79	48,28
2021	6,90	37,93	17,24	37,93
2022	6,90	34,48	20,69	37,93
Rata-rata	3,45	37,93	13,79	44,83

Sumber: data diolah, 2024

Bila melihat banyaknya DMU (kabupaten/kota) yang telah mencapai efisien teknis (*perfectly efficiently/best practice*) yang paling banyak pada tahun 2012 dan 2014 dimana sebanyak 5 atau sebesar 17,24% Kabupaten/Kota se Provinsi Papua yang telah mencapai efisiensi teknis 1 atau 100%. Sementara kabupaten lainnya masih *inefficient* atau TE dibawah nilai 1 atau dibawah 100% sehingga DMU (kabupaten) yang *inefficient* dapat mengadopsi atau mencontohi (*best practise*) DMU (Kabupaten/Kota) yang telah efisien (*benchmark*). (untuk *benchmark* tahun 2022 dapat dilihat pada tabel *peers* pada sub bab hasil diatas dan untuk tahun lainnya dapat dilihat pada lampiran 1 hasil olah DEA menggunakan software DEAP 2.1).

Setelah DMU (*decision making unit*) *inefficient* mengetahui *benchmark*-nya (anggota *peers*) yang merupakan DMU yang relative efisien (*best practise*) yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan menurunkan atau menaikkan nilai *output* (*input*) sebesar nilai *radial movement* dan *slack movement* dari hasil perhitungan DEA (Sarkis dan Talluri 2002). Disamping itu Talluri (2000) menyatakan yang bisa dilakukan DMU yang *inefficient* (*managerial*) adalah harus mempelajari dan mengimplementasikan strategi yang dimiliki oleh DMU yang efisien (*best practise*). Korhonen (1997) menyatakan DMU *inefficient* bisa memilih

salah satu *best practise* dalam *peers* yang paling diinginkan (*most preference*) untuk dijadikan contoh. Dasar yang digunakan adalah kemiripan (kesamaan) ukuran dan adanya keterbatasan *input-output* pada DMU *inefficient*.

Namun, metode DEA tidak bisa memberikan jaminan bahwa DMU yang telah melakukan perbaikan sesuai arahan diatas dapat beroperasi efisien pada tahun berikutnya. Metode DEA hanya bisa menunjukkan area-area yang seharusnya diperbaiki oleh DMU *inefficient* agar bisa beroperasi efisien. Bila *best practise* yang dipilih (di *benchmarks*) memiliki ukuran yang relatif sama (mirip) dengan DMU *inefficient*, maka kemungkinan besar DMU *inefficient* akan dapat beroperasi efisien pada tahun berikutnya. Seandainya DMU yang *inefficient* telah melakukan perbaikan namun tetap tidak bisa beroperasi efisien, hal ini berarti terdapat *X-inefficiency* dalam operasinya. Misalnya terdapat perbedaan motivasi dan keterampilan, perbedaan tingkat manajerial dengan *best practice*. Dengan demikian strategi yang dimiliki oleh *best practice* belum tentu cocok untuk diadopsi oleh DMU *inefficient* lainnya.

Pemerintah Kota Jayapura menjadi *best practise* dalam penelitian ini. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Jayapura, Pemerintah Daerah Kota Jayapura telah menjalankan beberapa program diantaranya Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pengembangan Infrastruktur Dasar, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Implementasi program-program tersebut dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Jayapura melalui berbagai dinas dan instansi terkait dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia di wilayah kota Jayapura.

Efisiensi Belanja Daerah Untuk Menurunkan Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Se Provinsi

Papua

Rata-rata persentase peringkat DMU (kabupaten/kota) di provinsi Papua sepanjang tahun 2010-2022 hanya sebesar 6,90% atau sebanyak 2 kabupaten/kota yaitu, kota Jayapura dan kabupaten Merauke. Selanjutnya, rata-rata sebanyak 48,28% atau 14 kabupaten yang masuk dalam kriteria Baik/Tinggi ($0,800 \leq TE < 1,00$), sementara itu rata-rata sebanyak 27,59% atau 8 kabupaten yang masuk dalam kategori Cukup Baik ($0,714 \leq Te < 0,800$), dan rata-rata sebanyak sebanyak 17,24% atau sebanyak 5 kabupaten yang masuk dalam kriteria Rendah ($TE < 0,714$).

Tabel 3. Persentase Pringkat DMU (Kabupaten/Kota) se Provinsi Papua berdasarkan Nilai TE DEA VRS Output Oriented Kemiskinan Tahun 2010-2022

Tahun	Kriteria Interval			
	Efisien (<i>perfectly efficiently/best practice</i>) (TE=1,00)	Baik/Tinggi ($0,800 \leq TE < 1,00$)	Cukup Baik ($0,714 \leq Te < 0,800$)	Rendah (TE < 0,714)
2010	10,34	34,48	41,38	13,79
2011	13,79	41,38	37,93	6,90
2012	17,24	37,93	37,93	6,90
2013	17,24	34,48	31,03	17,24
2014	17,24	41,38	27,59	13,79
2015	17,24	37,93	24,14	20,69
2016	17,24	37,93	17,24	27,59
2017	17,24	41,38	20,69	20,69
2018	13,79	41,38	24,14	20,69
2019	13,79	41,38	24,14	20,69
2020	13,79	41,38	20,69	24,14
2021	17,86	39,29	28,57	14,29
2022	17,24	34,48	41,38	6,90
Rata-rata	6,90	48,28	27,59	17,24

Sumber: data diolah, 2024

Salah satu keunggulan analisis penghitungan efisiensi dengan menggunakan metode DEA adalah selain mampu menemukan nilai efisiensi relatif dari masing-masing DMU, metode DEA juga mampu membuat skenario perbaikan input dan output yang sebaiknya digunakan bagi DMU-DMU yang belum efisien melalui langkah identifikasi *input* yang terlalu banyak atau

output yang terlalu rendah. Skenario perbaikan yang dihasilkan DEA dapat digunakan untuk memperbaiki tingkat efisiensi daerah atau UKE yang belum efisien. Hasil perhitungan perbaikan variabel *input-output* untuk mencapai nilai efisiensi teknis pada kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2010-2022 dengan metode DEA.

Pemerintah Kota Jayapura untuk mengentaskan kemiskinan berfokus pada peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Antara lain memberikan bantuan biaya pendidikan, subsidi kesehatan, perbaikan rumah tidak layak huni, serta pelatihan dan bantuan modal usaha mikro. Beberapa contoh program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura yang dapat ditiru (*best practise*) oleh pemerintah daerah lain di wilayah Provinsi Papua diantaranya Program Padat Karya, Program Khusus OAP, Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Jayapura, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Jayapura, Pelatihan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Secara keseluruhan, program-program tersebut merupakan upaya komprehensif Pemerintah Kota Jayapura dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas Belanja Daerah Untuk Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua

Dari hasil pengolahan regresi data panel sebanyak 26 atau sebesar 89,66% kabupaten/kota yang belanja daerahnya efektif dan berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan sementara sebanyak 3 atau sebesar 10,34% kabupaten/kota yang tidak efektif dan berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan yaitu Kabupaten Intan Jaya, Jayawijaya dan Kabupaten Nduga.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Ini berarti peningkatan belanja daerah dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota se Provinsi Papua.

Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja untuk program-program pengentasan kemiskinan yang efektif, seperti pemberian bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan mengoptimalkan alokasi belanja daerah pada program-program pengentasan kemiskinan, diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten kota se Provinsi Papua.

Belanja daerah yang tidak efektif dalam menurunkan kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebocoran anggaran, inefisiensi penggunaan anggaran, dan rendahnya kualitas belanja daerah sehingga perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, serta perbaikan kualitas belanja agar lebih berdampak pada pengurangan kemiskinan. Purwaningsih dan Widarjono (2021).

Tabel 4. Efektivitas Belanja Daerah Untuk Mengentaskan Kemiskinan di Kab/Kota Se-Provinsi Papua

Kab/Kota	Kemiskinan
Kab. Asmat	-0,3288
Kab. Biak Numfor	-0,2643
Kab. Boven Digoel	-0,3870
Kab. Deiyai	-0,0983
Kab. Dogiyai	-0,0602
Kab. Intan Jaya	0
Kab. Jayapura	-0,4726
Kab. Jayawijaya	0
Kab. Keerom	-0,4858
Kab. Kepulauan Yapen	-0,1930
Kab. Lanny Jaya	-0,1269
Kab. Mamberamo Raya	-0,3340
Kab. Mamberamo Tengah	-0,1012
Kab. Mappi	-0,2977
Kab. Merauke	-0,4218
Kab. Mimika	-0,3813
Kab. Nabire	-0,3688
Kab. Nduga	0
Kab. Paniai	-0,1047
Kab. Pegunungan Bintang	-0,1732

Kab/Kota	Kemiskinan
Kab. Puncak	-0,1134
Kab. Puncak Jaya	-0,1627
Kab. Sarmi	-0,6746
Kab. Supiori	-0,2072
Kab. Tolikara	-0,1626
Kab. Waropen	-0,2689
Kab. Yahukimo	-0,1491
Kab. Yalimo	-0,2079
Kota Jayapura	-0,5971

Sumber: data diolah, 2024

Efektivitas Belanja Daerah Untuk Menurunkan Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua

Selanjutnya, dari hasil perhitungan regresi data panel terdapat sebanyak 28 atau sebesar 96,55% kabupaten/kota yang belanja daerahnya efektif dan berpengaruh signifikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sementara hanya sebanyak 1 atau sebesar 3,45% kabupaten/kota yang tidak efektif dan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu Kota Jayapura.

Temuan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikator pembangunan manusia (IPM) mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah dapat mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia di kabupaten/kota se Provinsi Papua. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja daerah yang lebih besar pada sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Prioritas alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan indikator pembangunan manusia di kabupaten/kota se Provinsi Papua.

Belanja daerah yang tidak efektif dan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat disebabkan oleh belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai daripada belanja pembangunan yang dapat

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, alokasi belanja daerah yang tidak tepat sasaran dan tidak berorientasi pada peningkatan IPM menyebabkan belanja daerah tidak berdampak signifikan pada IPM, dan kualitas implementasi program yang rendah. Kuncoro dan Murwati (2021). Untuk kondisi Kota Jayapura dimana capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapai kategori sangat tinggi, namun belanja daerahnya tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 5. Efektivitas Belanja Daerah Untuk Meningkatkan IPM Di Kab/Kota Se Provinsi Papua

Kab/Kota	IPM
Kab. Asmat	0,1679
Kab. Biak Numfor	0,0606
Kab. Boven Digoel	0,1418
Kab. Deiyai	0,0510
Kab. Dogiyai	0,0788
Kab. Intan Jaya	0,2171
Kab. Jayapura	0,0719
Kab. Jayawijaya	0,1323
Kab. Keerom	0,1129
Kab. Kepulauan Yapen	0,0624
Kab. Lanny Jaya	0,1302
Kab. Mamberamo Raya	0,1528
Kab. Mamberamo Tengah	0,0824
Kab. Mappi	0,1048
Kab. Merauke	0,0872
Kab. Mimika	0,0802
Kab. Nabire	0,0760
Kab. Nduga	0,4003
Kab. Paniai	0,0743
Kab. Pegunungan Bintang	0,1721
Kab. Puncak	0,1788
Kab. Puncak Jaya	0,2259
Kab. Sarmi	0,1599
Kab. Supiori	0,0782
Kab. Tolikara	0,1405
Kab. Waropen	0,0735
Kab. Yahukimo	0,1688
Kab. Yalimo	0,1744
Kota Jayapura	0

Sumber: data diolah, 2024

Pada umumnya, belanja daerah yang dialokasikan untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diyakini dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah. Namun, ketika IPM suatu daerah sudah berada pada level yang tinggi, maka dampak peningkatan belanja daerah terhadap IPM menjadi kurang signifikan. Daerah-daerah dengan IPM tinggi umumnya telah berhasil mencapai tingkat pembangunan manusia yang relatif baik, seperti akses pendidikan dan kesehatan yang memadai. Pada kondisi ini, peningkatan belanja daerah tidak lagi memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan IPM, karena faktor-faktor yang menyusun IPM sudah berada pada level yang cukup tinggi. Pada daerah dengan IPM tinggi, prioritas alokasi belanja daerah cenderung bergeser dari sektor-sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan, menuju sektor-sektor lain yang dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Sehingga peningkatan belanja daerah tidak lagi secara langsung berdampak signifikan pada peningkatan IPM.

SIMPULAN

Hasil analisis DEA menunjukkan adanya variasi tingkat efisiensi belanja daerah di Provinsi Papua selama periode penelitian. Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua teridentifikasi sebagai unit yang efisien dalam penggunaan belanja daerah, sementara yang lain masih memiliki potensi peningkatan efisiensi. Tidak semua kabupaten/kota se provinsi Papua yang belanja daerahnya efisien untuk meningkatkan IPM. Secara rata-rata sepanjang tahun 2010-2022 hanya 1 kota yang belanja daerahnya mencapai efisiensi teknis 1 atau 100% secara konstan (menggunakan *input*/sumberdaya yang ada untuk meningkatkan *output* semaksimal mungkin) yaitu Kota Jayapura yang belanja daerahnya efisien untuk meningkatkan IPM.

Sedangkan kabupaten/kota se provinsi Papua yang belanja daerahnya efisien untuk menurunkan kemiskinan secara rata-rata sepanjang tahun 2010-2022 hanya 2

kabupaten/kota yang belanja daerahnya mencapai efisiensi teknis 1 atau 100% secara konstan (menggunakan *input*/sumberdaya yang ada untuk meningkatkan *output* semaksimal mungkin) yaitu, Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke.

Selain itu, hasil analisis regresi data panel untuk mengetahui efektivitas dan pengaruh belanja daerah terhadap indikator pembangunan manusia dan persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indikator pembangunan manusia. Di sisi lain, belanja daerah juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan peningkatan belanja daerah di Provinsi Papua dapat berkontribusi pada peningkatan pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan yaitu sebanyak 28 atau sebesar 96,55% Kabupaten se Provinsi Papua yang belanja daerahnya efektif dan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu, Kab. Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo dan Yalimo. Namun terdapat 1 Kota yang belanja daerahnya tidak efektif atau berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu, Kota Jayapura.

Sedangkan sebanyak 26 atau sebesar 89,66% Kabupaten/Kota se Provinsi Papua yang belanja daerahnya efektif dan berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan yaitu, Kab. Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Jayapura, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo dan Kota Jayapura. Namun terdapat 3 Kabupaten yang belanja

daerahnya tidak efektif atau berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan yaitu, Kabupaten Intan Jaya, Jayawijaya dan Nduga.

Untuk peneliti selanjutnya menambahkan variabel-variabel lain dan faktor-faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, seperti faktor kondisi geografis, politik, sosial, budaya, dan infrastruktur. Hal ini dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap determinan-determinan keberhasilan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Papua perlu meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengentaskan kemiskinan di Papua. Diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja daerah agar dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2021). *Efektivitas Belanja Pemerintah Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Kabupaten Barru*.
- Dewi, R., & Suparmoko, M. (2017). Pengaruh Efisiensi Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
- Hafizrianda, Y. (2017). Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Papua : Suatu Penerapan Data Envelopment Analysis Di Sektor Pendidikan. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(1). <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.742>
- Harjowiryo, M. (2011). Deskripsi dan analisis APBD 2011. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Jafarov, E., & Gunnarsson, V. (2008). *Efficiency of Government Social Spendingin Croatia. Financial Theory and Practice* Vol. 32 No. 3.
- Kristiyanto, S., & Widodo, S. (2017). Analisis Efisiensi Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota Di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 17(1), 1–12. <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/2310>
- Kumpangpune, N., Saerang, D. P. E., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.24818.20.2.2019>
- Kurnia, A. S. (2017). Model Pengukuran Kinerja Dan Efisiensi Sektor Publik Dengan Metode

- Free Disposable Hull (FDH). *Jurnal Bisnis Strategi*, 15(1).
- Knot, Anne Marie. MacKelvey, Bill. (1999). *Nirvana Efficiency: A Comparative Test Of Residual Claims and Routines*. *Journal of Economic Behavior and Organization* Vol. 38 (1999) pp. 365-383
- Korhonen, Pekka. (1997). *Searching the Efficient Frontier in Data Envelopment Analysis*. International Institute for Applied System Analysis. www.iiasa.ac.at
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430
- Kuncoro, A., & Murwati, A. (2021). *Pengaruh Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 193-208.
- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98. <https://doi.org/10.35917/tb.v17i2.49>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi. Yogyakarta
- Mangkoesebroto, G. (1994). *Kebijakan ekonomi publik di Indonesia: substansi dan urgensi: kumpulan tulisan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pantas, O. O., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penurunan Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 36–47. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23452.20.01.2019>
- Paulus, D. I. S., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–18. <https://doi.org/10.35794/jpekd.15781.19.2.2017>
- Prakasa, G. S., & Suparyati, A. (2022). Dampak Efektivitas Dan Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Jawa. *Media Ekonomi*, 30(1), 16–29. <https://doi.org/10.25105/me.v30i1.10133>
- Putri, rahma D. P., & Prasetyia, F. (2023). Efisiensi Relatif Belanja Sektor Publik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Journal Of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 233–249. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.01>
- Purwaningsih, Y., & Widarjono, A. (2021). *The Impact of Regional Expenditure on Poverty Reduction in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 22(1), 59-71
- Rotinsulu, D. C., Tenda, A. R., & Leonufina, L. M. (2019). Analisis Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(3). <https://doi.org/10.35794/jpekd.14202.18.3.2016>
- Rambe, Isnaini Halimah dan Muhammad Romi Syahputra. (2017). Aplikasi Data Envelopment Analysis (DEA) Untuk Pengukuran Efisiensi Aktivitas Produksi. *Journal of Mathematics Education and Science*. Vol. 2, No. 2
- Sendow, R. H., Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, T. O. (2018). Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Program Study Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal*

- Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 15–32.
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Silvia Nurul Hidayah. (2019). *Efisiensi Pemerintah dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Tahun 2016-2017 (Studi Kasus : Pemerintah Provinsi Banten)*. 2017, 92.
- Simanjuntak dan Halim. (2018). Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
- Sarkis, Joseph. Talluri, Srinivas. (2022). *Efficiency Measurement of Hospital: Issues and Extensions*. International Journal of Operation and Production Management Vol. 22, No. 3, 2002. pp. 306-313
- Sumarsono dan Purwanti (2017). *Pengaruh Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 1, No. 2, 2017
- Wulandari (2019). *Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 20, No. 1, 2019
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang. Pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- [DJPK] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2024. Realisasi APBD Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota, 2010-2022. DJPK. [internet]. Diunduh dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2022. BPS. [internet]. Diunduh dari <https://papua.bps.go.id/>